



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BANK INDONESIA (BI)  
**UNIT KERJA** : KPW PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : BUDI WIDIHARTANTO
2. Jabatan : DEPUTI KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 426157

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.116.759.666

1. Bangunan Seluas 3.5 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 73.375.000
2. Bangunan Seluas 4.64 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 102.750.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/160 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 620.880.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/282 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
5. Tanah Seluas 846 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 111.621.333
6. Tanah Seluas 1600 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 208.133.333

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 495.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN C 200 CGI Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV CRV SUV 2500 CC AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 56.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 264.456.744**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.932.216.410



III. HUTANG

Rp.

1.313.652.669

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.618.563.741

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.